



Tangani Defisit APBD 2018

GUBERNUR Kalimantan Barat Sutarmidji memastikan defisit anggaran yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Barat sudah tertangani secara baik dan posisinya *balance* atau berimbang.

Seperti diketahui, defisit APBD Tahun 2018 Provinsi Kalbar sempat mencapai angka Rp 691 miliar. Hal

ini menjadi polemik antara eksekutif dan legislatif hingga berimbas kepada penundaan penyampaian Laporan Badan Anggaran (Bangar) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 hingga kini.

Penundaan dilakukan usai adanya surat permintaan dari Gubernur Kalbar Sutarmidji kepada DPRD Kalbar untuk menunda sementara waktu lantaran ada beberapa hal perlu dialami oleh eksekutif.

"Alhamdulillah, defisit anggaran sudah selesai. Sudah tertangani dan posisinya *balance*," ungkapnya.

Sutarmidji menjelaskan posisi itu berhasil dicapai setelah dirinya selaku eksekutif mengambil kebijakan sebagai upaya menangani defisit. Beberapa langkah yang ditempuh diantaranya pemotongan anggaran perjalanan dinas, penundaan beberapa kegiatan pembangunan yang tidak mendesak, pengurangan hibah dana dan lain sebagainya.

"Kemudian ada peningkatan sumber pendapatan sehingga defisit itu sudah tertangani," terangnya.

Ia berharap kondisi itu bisa terus berjalan kendati banyak hal yang terpaksa ditunda demi penurunan angka defisit APBD. Midji sapaannya tidak menampik pasca penerapan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil itu akan ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. "Akan ada perlambatan-perlambatan dalam pembangunan. Karena cukup besar proyek pembangunan fisik yang ditunda berkaitan jalan dan lainnya. Ada sekitar Rp 300-an Miliar," imbuhnya. **(Pra)**